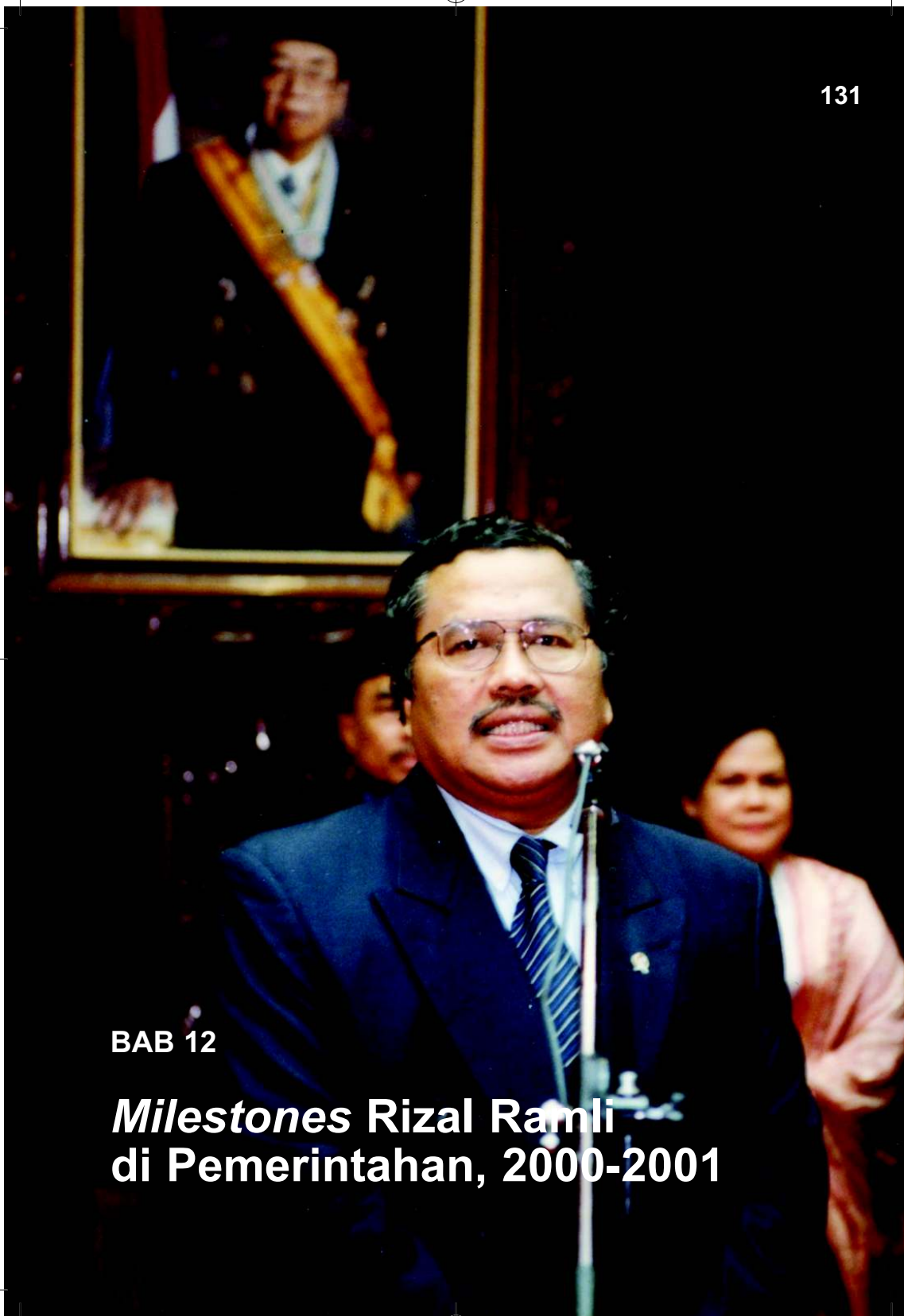


**BAB 12**

***Milestones Rizal Ramli  
di Pemerintahan, 2000-2001***



Selama belasan tahun Rizal Ramli memimpin lembaga *think tank* independen ECONIT Advisory Group. Hasil kajiannya yang kritis dan analitis, didukung fakta dan data yang akurat, membuat reputasinya sebagai ekonom sangat menonjol.

Tahun 2000, Rizal Ramli masuk ke gerbang pemerintahan dengan menjadi Kepala Bulog, tak lama kemudian diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di ujung masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli diangkat menjadi Menteri Keuangan.

Meski masa baktinya di pemerintahan tergolong singkat, toh jejak yang ditinggalkannya cukup banyak. Rizal Ramli ibarat buldozer, yang menyeruduk berbagai kebobrokan yang terjadi di Bulog. Pembinaan besar-besaran yang dicanangkan di Bulog mengantarkannya menjadi Perusahaan Umum, yang lebih transparan dan *accountable*.

Ketika menjadi Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), banyak sektor dan bidang usaha yang direstrukturisasi. Problem yang terkatung-katung – karena tidak ada pihak yang berinisiatif menyelesaikannya, secara proaktif dituntaskan oleh Rizal Ramli, seperti restrukturisasi sektor properti dan utang usaha kecil dan menengah (UKM).

Banyak langkah dan kebijakan inovatif yang dijalankan Rizal Ramli semasa menjabat Menko Perekonomian.. Dengan *leadership*-nya yang kuat, Rizal Ramli mampu menjadikan Tim Ekonomi kabinet Gus Dur – Megawati sebagai satuan kerja yang solid.

Inisiatif mengambil kebijakan yang sebelumnya buntu, kecerdikan mencari alternatif solusi sebuah masalah, keberanian menghadapi risiko atas sebuah keputusan, dan langkah-langkahnya yang inovatif, membuat karier Rizal Ramli di pemerintahan yang singkat itu penuh dengan inovasi dan terobosan. Inilah serangkaian aksi nyata Rizal Ramli sebagai Lokomotif Perubahan di pemerintahan.

**BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG), April – Agustus 2000**

- 3 April 2000** : Dilantik sebagai Kepala Bulog. Sebagai Kepala Bulog, Rizal Ramli melakukan reformasi dan membenahan organisasi dan keuangan Bulog agar lebih transparan dan *accountable*. Memberikan tekanan pada pelaksanaan fungsi Bulog sebagai stabilisator harga beras dan peningkatan pendapatan petani. Selama menjadi Kepala Bulog, terjadi penghematan dan peningkatan efisiensi biaya operasi Bulog yang sangat signifikan sehingga Bulog menghasilkan surplus yang cukup besar.
- April – Mei 2000** : Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, Bulog meningkatkan pembelian gabah, bukan beras. Selain itu, untuk meningkatkan harga jual beras di dalam negeri dan meningkatkan pendapatan petani, Bulog tidak melakukan impor beras.
- Mei 2000** : Bulog meminta Ditjen Bea & Cukai untuk memasukkan impor beras oleh swasta ke dalam jalur merah sehingga manipulasi volume maupun harga dapat dikurangi.
- April – Mei 2000** : Mengubah pola subsidi, dari subsidi umum menjadi subsidi terarah (*targeted subsidy*) dalam penyaluran beras untuk golongan masyarakat miskin.
- Juni 2000** : Bulog berhasil menyalurkan beras kembali kepada TNI/Polri dan sebagian besar PNS.
- April – Agustus 2000** : Melakukan restrukturisasi di Bulog agar menjadi organisasi yang transparan, *accountable*, dan lebih profesional, sekaligus untuk mendorong regenerasi. Restrukturisasi di Bulog melibatkan 5 jabatan eselon I (Deputi)

dan 54 jabatan eselon II (Karo dan Kadolog) tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Dari 26 Kadolog yang ada di seluruh Indonesia, 24 di antaranya dipensiunkan atau dimutasikan dalam rangka restrukturisasi tersebut.

**April – Agustus 2000** : Mengubah sistem *accounting* Bulog menjadi *Generally Accepted Accounting practices*.

Menghapuskan dana *off-budget* sehingga semua transaksi menjadi *on-budget* sehingga lebih transparan dan *accountable*.

Memulai proses restrukturisasi dalam rangka menyiapkan Bulog dari LPND ke arah Perum.

#### SEKRETARIS TIM MONITORING PROGRAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI, April – Agustus 2000

**Mei – Agustus 2000** : Diangkat sebagai Sekretaris Tim Monitoring Program Percepatan Pemulihan Ekonomi, bertugas membantu Presiden RI dan Kabinet dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dalam bidang perekonomian ( $\pm$  50 keputusan penting) sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peletakan landasan percepatan pemulihan ekonomi nasional.

#### MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, Agustus 2000 – Juni 2001

**26 Agustus 2000** : Dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

**4 September 2000** : Menganangkan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi yang diakui oleh dunia inter-

nasional sebagai program pemulihan ekonomi yang kredibel.

**September 2000** : Menghadiri IMF-World Bank Annual Meeting di Praha, Republik Czeck dan melakukan serangkaian pertemuan dengan para pejabat penting, seperti Presiden Bank Dunia, Presiden IFC, Menteri Keuangan OECD, pejabat Standard & Poor's (S&P), dll., untuk menjelaskan mengenai 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia. Pada akhir bulan September 2000, S&P menaikkan *rating* mata uang Indonesia dari C ke B- dengan *outlook* "stable".

**17 – 18 Oktober 2000** : Memimpin delegasi Indonesia dalam CGI Meeting di Tokyo. Di tengah keraguan dan pesimisme banyak pihak, ditambah dengan tajamnya sorotan dunia internasional terhadap kasus Atambua, Menko Perekonomian berhasil meyakinkan para kreditor yang tergabung dalam CGI untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar US\$ 5,3 miliar (US\$ 4,8 miliar dalam bentuk pinjaman lunak dan mendapatkan *grant & technical assistance* senilai US\$ 530 juta.

**Oktober 2000** : Sebagai bentuk dari mulai pulihnya kepercayaan investor internasional, Unocal Corporation menyatakan komitmennya untuk melakukan investasi sebesar US\$ 1,5 miliar di Indonesia untuk jangka waktu investasi 5 tahun. Investasi tersebut akan dilakukan sampai tahun 2002 dengan fokus pada bidang minyak bumi, gas bumi, dan sumber daya geotermal.

**Akhir tahun 2000** : Ekonomi Indonesia selama tahun 2000 tumbuh sebesar 4,8%, di atas perkiraan semula yang hanya 2-3% dengan *budget deficit* yang lebih kecil dari perkiraan semula, yaitu hanya

-3,2% dari GDP (perkiraan semula adalah -4,8% dari GDP). *Turn around* ekonomi Indonesia mulai terjadi pada tahun 2000.

Total ekspor Indonesia selama tahun 2000 mencapai US\$ 62 miliar, atau naik 27% dari ekspor Indonesia pada tahun 1999.

Jumlah penduduk yang bekerja meningkat sebesar 1 juta tenaga kerja.

Perbaikan signifikan di sektor riel yang diperhatikan dengan: (a) tingkat penggunaan listrik oleh sektor industri yang meningkat sebesar 8,5% dibandingkan dengan rata-rata 5% selama krisis, walaupun terjadi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang cukup tinggi, (b) tingkat penjualan eceran dan tingkat penjualan sepeda motor yang merupakan cerminan dari daya beli masyarakat golongan menengah ke bawah juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 17% dan 71%, (c) sektor konstruksi yang semula stagnan selama 2 tahun terakhir, mulai menunjukkan kebangkitan dengan pertumbuhan sebesar 8,3%.

Terjadi peningkatan pemanfaatan kapasitas terpasang di sektor industri dari sekitar 50-60% pada akhir tahun 1999 menjadi sekitar 70-80% pada akhir tahun 2000.

Dalam bidang perbankan, terjadi perbaikan sejumlah indikator penting seperti menguatnya struktur permodalan, menurunnya rasio *non-performing loans*, dan membaiknya *net interest margin*.

#### Januari 2001

: Menganangkan 3 Program Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani (restrukturisasi hutang petani, termasuk pemberian

*hair cut*, penyempurnaan distribusi pupuk, dan reformasi KUD).

**Januari – Mei 2001** : Mempercepat proses “go public” terhadap BUMN dalam rangka memenuhi target APBN 2001, terutama terhadap BUMN Indofarma dan Kimia Farma.

Memulai proses “go public” Bank Mandiri, yang merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia.

**Januari 2001** : Indonesia dan Singapura menandatangani kontrak jual-beli gas alam dari Natuna Barat senilai US\$ 9,4 miliar selama 22 tahun. Selain itu, juga ditandatangani kontrak jual-beli gas alam dari Sumatera Selatan ke Singapura senilai US\$ 14 miliar.

**Januari 2001** : Membentuk Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk merumuskan strategi dan kebijakan dalam bidang infrastruktur.

**Mei 2001** : Mendorong penghapusan *cross-ownership* dan *cross-management* di industri telekomunikasi antara PT Telkom dan PT Indosat, sekaligus untuk menciptakan kompetisi dan mendorong kedua operator telekomunikasi nasional tersebut menjadi *full service operators*. Langkah ini dinilai sebagai langkah yang tepat dan kredibel serta mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari berbagai kalangan, baik domestik maupun internasional. Langkah ini menghasilkan Rp 5 triliun penerimaan negara tanpa menjual sama sekali saham Telkom maupun Indosat.

**Juni 2001** : Memimpin pre-CGI meeting di Jakarta yang merupakan forum evaluasi kinerja ekonomi tengah tahun bersama negara-negara donor yang tergabung dalam CGI.

## KETUA KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN, Agustus 2000 – Juni 2001

Selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, DR. Rizal Ramli juga menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Di bawah kepemimpinan DR. Rizal Ramli, KKSK telah berhasil memutuskan sekitar 140 keputusan penting, baik yang menyangkut restrukturisasi utang maupun percepatan penjualan asset yang dikelola oleh BPPN.

- Oktober 2000** : Memulai restrukturisasi hutang dari 14.000 UKM yang memiliki nilai pinjaman  $\leq$  Rp 5 miliar.
- Oktober 2000** : Menyelesaikan rekapitalisasi perbankan, termasuk rekapitalisasi Bank Bali.
- November 2000** : Mempercepat penjualan asset yang dikelola PT Holdiko Perkasa, yang melibatkan 6 asset utama (Salim Oleochemical, Indomilk, Indolakto, Indomiwon, Mosquito Coil, dan 25 perkebunan kelapa sawit milik Salim Grup – yang dijual kepada Guthrie, Malaysia) dengan total nilai mencapai Rp 5,97 triyun.
- November 2000** : Menyelesaikan penjualan kredit-kredit di bawah Rp 5 miliar kepada pihak ketiga dengan total nilai Rp 871 miliar yang terdiri dari 92.252 debitur.
- Desember 2000** : Restrukturisasi bisnis dan utang PT IPTN menjadi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) sehingga *viabile* secara bisnis dan finansial. Akibat langkah-langkah tersebut penjualan PT DI meningkat dari Rp 508 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp 1,4 triliun pada tahun 2001. Kerugian perusahaan sebesar Rp 75 miliar tahun 1999 berubah menjadi keuntungan sebesar Rp11 miliar.



- Desember 2000** : KKSK berhasil menekan pihak Marubeni sebagai kreditor Chandra Asri untuk menurunkan tingkat suku bunga pinjaman dan memperpanjang jangka waktu pengembalian pinjaman dari 12 tahun menjadi 15 tahun.
- Desember 2000** : KKSK menyetujui penjualan saham Indoement kepada Heidelberger Zement.
- Akhir tahun 2000** : Penjualan aset tahun 2000 mencapai Rp 20,71 triliun, melebihi target yang hanya sebesar Rp 18,9 triliun. Sementara itu restrukturisasi hutang di bawah payung Prakarsa Jakarta berhasil mencapai US\$ 9,8 miliar atau di atas target sebesar US\$ 8 miliar.
- Januari 2001** : KKSK mempercepat proses negosiasi restrukturisasi hutang yang melibatkan sejumlah bisnis skala besar.
- Januari – Februari 2001**: KKSK menyetujui “Corporate Restructuring Guidelines” yang baru yang dinilai banyak pihak, sebagai kebijakan yang kredibel dan dinilai mampu mempercepat proses restrukturisasi hutang yang dikelola BPPN.
- April 2001** : Melakukan Restrukturisasi sektor Real Estat Indonesia yang memiliki kredit macet di BPPN. Hampir seluruh perusahaan besar Real Estat Indonesia memiliki kredit macet yang besar di bank-bank Nasional pasca krisis 1998 dan yang kemudian diserahkan ke BPPN. KKSK melakukan restrukturisasi kredit real estate dengan memperpanjang tenor pinjaman dan memberikan *discount* pembayaran bunga. Akibat restrukturisasi tersebut, sektor real estat bisa bangkit kembali dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi tahun 2003-2004.

## KETUA TIM KEPPRES 133, Agustus 2000 – Juni 2001

Selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, DR. Rizal Ramli juga menjabat sebagai Ketua Tim Keppres 133 yang bertugas menyelesaikan restrukturisasi PLN dan renegotiasi kontrak-kontrak pembelian listrik swasta (IPP) bersama-sama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

### Agustus 2000 – Juni 2001

: Menyelesaikan 16 dari total 27 kasus renegotiasi kontrak pembelian listrik swasta (IPP).

Melakukan renegotiasi kontrak pembelian listrik swasta (*independent power producers/IPP*). Kontrak penjualan listrik swasta yang dibuat pada masa Orde Baru itu penuh dengan KKN dan *mark-up*. Akibatnya, berbagai kontrak itu membebani PLN sebesar US\$ 80 miliar. Renegosiasi ditekankan pada penurunan tarif penjualan mereka ke PLN, dari sekitar US\$ 7-9 cents per kWh menjadi hanya US\$ 4 cents. Melalui negosiasi yang alot dan sejumlah terobosan akhirnya beban PLN turun menjadi US\$ 35 miliar.

### Januari – Mei 2001

: Melakukan revaluasi aset sekaligus menetapkan kebijakan *deffered tax payment*, dalam upaya memperbaiki posisi keuangan PLN sehingga menjadi lebih sehat dan kembali memiliki akses kepada perbankan dan pasar obligasi. Dengan langkah-langkah tersebut, aset PLN meningkat dari Rp 52 triliun menjadi Rp 202 triliun, dan modalnya meningkat dari -Rp 9,1 triliun menjadi ± Rp 119,4 triliun, dengan struktur aset dan modal kuat tersebut PLN memiliki akses untuk mendapatkan modal kerja dari perbankan maupun dari pasar obligasi. Disamping itu, PLN juga diminta untuk mengurangi kerugian transmisi (*transmission loss*) yang saat itu sangat tinggi (16%).

**MENTERI KEUANGAN, Juni 2001 – Juli 2001**

**13 Juni 2001** : Dilantik menjadi Menteri Keuangan.

**Juni – Juli 2001** : Menyelesaikan pembahasan mengenai revisi APBN 2001 dengan DPR. Proses pembahasan *budget* ini merupakan pembahasan tercepat dalam sejarah Indonesia modern. (13-16 Juni).

Meningkatkan target-target internal dari Direktorat-direktorat Jenderal yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan, sebesar 10-20%. Peningkatan target-target internal tersebut terutama dari segi penerimaan, seperti pada Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pajak, Ditjen Pembinaan BUMN, dan BPPN.

Menyelesaikan pembahasan mengenai Undang-undang Perhitungan Anggaran Negara 1999/2000. Memulai pembahasan RUU mengenai Badan Peradilan Pajak.